

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia sebagai tatanan politik yang baik dan ideal. Secara historis, demokrasi merupakan sebuah ideologi yang dinyatakan paling baik dan wajar untuk sebuah sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh setiap individu dalam sebuah negara.¹ Demokrasi pada umumnya dimengerti sebagai suatu sistem yang dapat memenuhi dan menjamin kepentingan masyarakat. Karena itu, demokrasi adalah sistem politik yang menganut prinsip legitimasi suatu negara di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat artinya bahwa rakyat memiliki peran yang sangat fundamental dalam mekanisme pemerintahan. Oleh karena itu, secara substansial konsep demokrasi lebih terarah kepada kepentingan rakyat yang menjadi prioritas dalam semua kebijakan sosio-politik yang diambil. Schumpeter sebagaimana dikutip oleh Saverinus Harto, “demokrasi merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang bagi rakyat untuk dapat menerima dan menolak mereka melalui proses pemilu yang kompetitif.”²

Pandangan Schumpeter di atas umumnya dikenal sebagai sistem demokrasi prosedural yang mengisyaratkan perlunya arena terbuka dalam proses seleksi kepemimpinan, pembentukan opini dan kehendak dengan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Sistem demokrasi sangat mengedepankan kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi kebebasan warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini dibutuhkan proses politik yang baik dan benar. Sebuah sistem politik dianggap demokratis jika para pembuat (presiden, perdana menteri dan legislatif) dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur, dan para kandidat bebas bersaing untuk mendapatkan suara serta seluruh rakyat dewasa diberi kebebasan memilih. Dalam penjabarannya, Bilverr Singh menyatakan³:

¹ Saverinus Harto, “Memahami Demokrasi Menurut Muhammad Hatta dan Aplikasinya Untuk Indonesia” (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2015), hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 15.

³ Bilverr Singh et al., *Demokrasi TakBoleh Henti*, ed. A. Makmur Makka, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 202.

Hak politik memungkinkan rakyat berperan serta secara bebas di dalam sistem yang digunakan untuk memilih pembuat kebijakan dan keputusan otoritatif yang menyangkut kepentingan nasional, regional, atau lokal. Di negara dengan kategori “bebas”, sistem ini mewakili hak seluruh orang dewasa untuk memilih dan bersaing untuk memperebutkan jabatan pemerintahan. Para wakil terpilih pun mempunyai suara yang menentukan terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan sipil ini mencakup kebebasan mengembangkan otonomi dalam pikiran, lembaga dan pribadi yang terpisah dari negara. (*freedom house: survey methodology*).

Di samping itu, demokrasi sebagai sistem politis adalah sebuah mekanisme politik untuk pengambilan keputusan publik yang mewujudkan kepentingan umum.⁴ Kepentingan umum merupakan tujuan utama dan paling mulia dalam negara yang demokratis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Kelahiran demokrasi di Indonesia bisa dibilang sejajar dengan terbentuknya negara Indonesia yang dimulai dari masa pra kemerdekaan sampai pada pasca-kemerdekaan.⁵ Demokrasi di Indonesia awalnya diterapkan pertama kali oleh presiden Soekarno pada masa revolusi kemerdekaan yang dilatarbelakangi oleh kemendesakan situasi untuk segera memilih sistem politik yang cocok bagi negara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno terjadi dua kali pengantian model sistem demokrasi: dari demokrasi parlementer (liberal) ke demokrasi terpimpin.⁶ Demokrasi parlementer gagal karena Soekarno melihat sistem ini tidak efektif bagi dunia perpolitikan saat itu. Menjelang akhir 1950-an Soekarno mencoba sistem demokrasi dengan wajah baru yaitu demokrasi terpimpin. Dalam praktik demokrasi terpimpin bukan saja sangat tidak demokratis melainkan juga mengarah kepada otoritarianisme. Bertolak dari pelbagai sejarah perkembangan

⁴ Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas (Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama, Sampai Postsekularisme)* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018), hlm. 46.

⁵Saverinus Harto, *op. cit.*, hlm. 1-2.

⁶Yeremias Emanuel, “Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia (Tinjauan Kritis Atas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung)” (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2007), hlm. 1.

Indonesia, demokrasi seringkali mengalami pasang surut yang dimulai pada awal kemerdekaan. Hal ini terjadi karena adanya pergolakan politik masa itu.

Namun setelah berakhirnya Orde Lama tahun 1965, lahirlah Orde Baru yang secara radikal mengubah wajah demokrasi sedemikian rupa sehingga menjadi negara yang otoriter dan feodalistik. Hal ini ditandai dengan demokrasi yang kehilangan makna di dalam dirinya. Di bawah kendali Soeharto yang adalah seorang otoriter, suara dan aspirasi tidak didengarkan. Suara kritis rakyat pun sama sekali tidak diberi ruang dan kebebasan. Seperti yang diketahui pada masa pemerintahan Orde Baru ruang demokrasi bagi warga sangat terbatas karena kuatnya kontrol dari negara yang berujung pada perampasan hak-hak politik warga negara untuk mengaktualisasikan hak politiknya. Artinya pada masa Orde Baru keberadaan demokrasi sejatinya tidak mempunyai arti atau kehilangan nilai pada dirinya sendiri.

Indonesia baru mengalami pembaruan politik mendasar sejak tahun 1998 yang ditandai dengan munculnya gerakan reformasi, dan berakhirnya sistem otoriter Orde Baru rezim Soeharto. Gerakan reformasi muncul karena rasa ketidakpuasan dan kekecewaan dari kaum muda terhadap pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Dengan demikian, pada akhirnya sistem Orde Baru ditumbangkan dengan lengsernya Soeharto dari tahta kekuasaannya. Pada tahun 2004, Indonesia mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dengan sistem pemilihan secara langsung. Hal ini mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.⁷ Kendatipun Indonesia terlepas dari gengaman rezim Soeharto, praktik demokrasi di Indonesia pun belum sepenuhnya bebas. Artinya eksistensi demokrasi yang ideal di Indonesia masih jauh dari harapan bangsa, dan bahkan hampir tidak mempunyai perwujudan yang konkret dalam perpolitikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pelbagai aspek dalam negara, salah satunya ialah adanya praktik politik dinasti, yang bertumbuh subur dalam dunia perpolitikan di Indonesia yang secara perlahan-lahan mengikis kualitas demokrasi bangsa.

Politik dinasti merupakan salah satu fenomena atau peristiwa munculnya calon pemimpin dari lingkungan kerabat atau keluarga kepala pemerintahan yang

⁷ Grignon De Monfotr Boli Pati Suri, "Dampak Korupsi Terhadap Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Melalui Penguatan Demokrasi" (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016), hlm. 31.

sedang memimpin atau berkuasa. Politik dinasti juga diartikan sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah di miliki kepada orang yang merupakan keluarga atau kerabatnya sendiri.⁸ Menurut Warsisto sebagaimana dikutip oleh Maldini, dijelaskan bahwa

gejala yang mendasari terbentuknya sebuah dinasti dapat dianalisis oleh dua hal. *Pertama*, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjejaring calon kepala daerah atau pejabat publik yang berkualitas sehingga hal tersebut menyebabkan terciptanya pragmatisme politik dengan mendorong kalangan keluarga atau kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi *status quodi* daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong sanak keluarga atau kerabat kepala daerah untuk menggantikan pertahanan.⁹

Fenomena ini merupakan bukti bahwa politik dinasti merupakan virus bagi kelangsungan negara yang menganut sistem demokrasi, tak terkuali Indonesia.

Di Indonesia praktik politik dinasti menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masa depan anak-anak bangsa dan masa depan negara. Dilihat dari perkembangannya, politik dinasti di Indonesia bukanlah hal yang baru, namun sudah lama terjadi. Praktik politik dinasti mulai banyak bermunculan ketika lahirnya era Orde Baru. Hal ini ditandai dengan kehadiran Siti Hardiyanti Rukmana yang merupakan putri dari Soeharto yang sudah menjabat sebagai presiden setelah bertahun-tahun lamanya. Siti Hardiyanti Rukmana atau biasa dipanggil Tutut merupakan anggota MPR RI dari Fraksi Golkar dari tahun 1992-1998. Setelah itu ia ditunjuk oleh ayahnya sendiri (Soeharto) untuk menjadi Menteri Sosial ke-23, walaupun menjabat selama beberapa bulan dikarenakan adanya tuntutan reformasi dari masyarakat indonesia.¹⁰ Menariknya, ketika era Orde Baru runtuh, praktik politik dinasti bukannya mengalami penurunan melainkan meningkat dengan sangat cepat, fenomena ini tampak dari wajah perpolitik indonesia sekarang ini.

⁸ Maldini, "Politik Dinasti di Indonesia dalam Perspektif Kekuasaan" (Bahan Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021), hlm. 4

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 6.

Di samping melanggengkan kekuasaan dan praktik korupsi, politik dinasti juga merupakan ancaman yang serius bagi kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tataatan politik yang demokratis. Artinya bahwa sebuah keputusan bersama merupakan hasil dari sebuah proses demokrasi yang melibatkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam ranah sosio-politik, di mana partisipasi ini didasarkan pada rasionalitas dan ketidakberpihakan. Karena itu, pemilihan umum yang bebas dan rahasia adalah salah satu ciri negara dan masyarakat demokratis. Kenyataan ini menunjukkan adanya kebebasan bagi rakyat untuk membentuk organisasi, perkumpulan yang dianggap perlu guna melakukan pelbagai hal demi mengisi dan mengembangkan kehidupan mereka baik sebagai pribadi maupun kelompok dalam masyarakat. Hal ini juga erat bertaut dengan hak kebebasan masyarakat menyatakan pendapat dan pikiran.¹¹

Dibalik realitas ini, adakecederungan bahwa warga negara mengalami pelbagai kesulitan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Hal ini sangat berbeda jauh dari konsep demokrasi yang sesungguhnya di mana rakyat harus memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam proses politik. Artinya bahwa adanya ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Kehadiran politik dinasti pun meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan.¹³ Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkannyatakan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia, dan hal inipun berdampak padaperkembangan demokrasi, Kesuburan politik dinasti tentu tidak terlepas pisah dari peran partai politik dan regulasi pilkada sehingga kualitas demokrasi semakin suram dan

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Demokrasi Klasik dan Modern*, ed. Diane Ravitch dan Abigail Thernstrom (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 4.

¹² Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia", *Jurnal of Government and Civil Society*, 1:2 (Semarang: September 2017), hlm. 112.

¹³ *Ibid.*

terancam lenyap. Ditambah lagi proses pengawasan dan pembatasan praktik politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan.¹⁴Karena pengawasan yang kurang ketat, politik dinasti justru terus berkembang dan mengegerogoti kehidupan politik di Indonesia yang berdampak pada kualitas sistem demokrasi.

Praktik politik dinasti tampak nyata dalam pemilihan umum di mana kedekatan atau relasi yang dibangun para elit politik dengan masyarakat baik secara personal maupun kelompok pada dasarnya mendahului kualitas. Dengan kata lain, praktik politik dinasti di Indonesia dapat menutup peluang lahirnya pemimpin yang berkualitas, dan melahirkan pemimpin abal-abalan karena adanya jaringan relasi. Ironisnya, banyak dari antara mereka hanya beorientasi pada materi belaka, bahkan melakukan tindakan korupsi dan mengabaikan tujuan utama yaitu menciptakan *bonum commune*. Pada tahap ini, eksistensi politik dinasti di Indonesia merupakan sebuah strategi politik yang dirangkai sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaan atau *status quo* dengan cara mewariskan kepada orang lain yang masih memiliki hubungan dekat seperti keluarga, ataupun kerabat dekat. Pada hakekatnya politik dinasti menimbulkan banyak pro dan kontra, sebagian ada yang menganggap baik karena kesetabilan politik terjaga dan sebagian juga menganggap bahwa politik dinasti hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk melanggengkan kekuasaannya, dan mempersempit kesempatan bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam lembaga perpolitikan, karena biasanya calon pemimpin dari politik dinasti lebih banyak sokongan.¹⁵Di samping adanya pro dan kontra, ada juga pengertian positif dan negatif tentang politik dinasti.¹⁶Positif serta negatifnya politik dinasti tergantung pada proses dan hasil (*output*) dari jabatan yang dipegang oleh jaringan politik dinasti bersangkutan. *Pertama*, politik dinasti dikatakan positif, apabila proses pemilihannya murni bersifat demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan serta

¹⁴Nur Hidayati, "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Orbith*, 10:1 (Semarang: Maret 2014), hlm. 19.

¹⁵ Bambang Cipto, *Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti: Dari Balik Suara Ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi* (Jakarta: Pt Rata Grafindo Persada, 1999), hlm. 56.

¹⁶ Burhanuddin Muthadi, *Perang Bintang: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres* (Jakarta: PT Mian Publika, 2014) hlm. 30.

kesejahteraan masyarakat maka politik dinasti dapat berarti positif. *Kedua*, politik dinasti dalam artian negatif, juga ditentukan oleh realitas sosial masyarakat, sistem hukum, penegakan hukum serta pelebagaan politik yang bersangkutan. Artinya, politik dinasti yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, pelebagaan politik yang belum mantap, maka politik dapat berarti negatif. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dari sini kita bisa memahami dengan baik bahwa tidak cukup bagi rakyat terlibat begitu saja dalam dunia politik tetapi ia harus memahami secara jelas esensi perpolitikan itu sendiri. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat sipil melalui pendidikan politik sangat penting agar mereka dapat tampil dalam pentas politik dengan pertimbangan rasional, penuh kesadaran dan kebebasan.

Berdasarkan realitas di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat kembali gagasan demokrasi yang sesungguhnya. Berangkat dari alur pikir yang telah dirumuskan dalam latar belakang, penulis mencoba menggarap kembali tulisan ilmiah dibawah judul **“Fenomena Politik Dinasti Sebagai Tantangan Bagi Sistem Demokrasi di Indonesia”**

1.2.Rumusan Masalah

Sejauh manakah praktik politik dinasti menggerogoti kualitas sistem demokrasi di Indonesia?

Dari pertanyaan utama di atas, dapat dipetakan menjadi beberapa anakan pertanyaan yakni

- Apa itu demokrasi dan sejauh mana perkembangannya di Indonesia?
- Apa itu politik dinastidan bagaimana bentuk politik dinasti dapat menanam pengaruhnya secara sistematis di Indonesia?
- Di mana letak ancaman politik dinasti terhadap sistem demokrasi di Indonesia?

1.3. Tujuan penulisan

1.3.1. Tujuan umum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa tujuan umum yaitu *pertama*, melalui karya ini penulis ingin menelisik sejauh mana politik dinasti menggerogoti kualitas sistem demokrasi di Indonesia

Kedua, penulis ingin menelaah dan memaknai secara kritis konsep politik dinasti dan menjelaskan di mana letak ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia

Ketiga, penulis ingin membuka wawasan masyarakat berkaitan dengandampak politik dinasti terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

1.3.2. Tujuan khusus

Selain tujuan umum di atas karya ilmiah ini juga memiliki tujuan-tujuan khusus antara lain: *pertama*, tulisan ini dibuat untuk memenuhi pra-syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada IFTK Ledalero

Kedua, tulisan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan ilmiah penulis. Sebagai seorang akademisi yang sedang belajar, penulis ingin mengasah lebih lanjut konsep demokrasi dan praktik-praktiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam praktik pemilihan umum.

1.4. Metode penulisan

Tulisan ini pada dasarnya merupakan kajian kritis dan ilmiah untuk memahami konsep praktik demokrasi dengan baik serta untuk memahami secara jelas tantangan-tantangan di tangan negara demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan cara mencari bahan-bahan dan membaca literatur lain yang berhubungan dengan tulisan ini.

1.5.Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab utama. Masing-masing bab akan memaparkan tema yang membentuk satu kesatuan isi dari skripsi ini.

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran secara umum tentang karya ilmiah ini, yang terdiri dari latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini penulis akan memaparkan tentang sistem demokrasi dan poin-poin penting dalam demokrasi seperti partisipasi politik dan hak-hak asasi manusia khususnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui pemilihan umum (pemilu).

Bab III pada bagian ini penulis akan memaparkan berbagai hal menarik mengenai fenomena politik dinasti seperti istilah politik dinasti, latar belakang munculnya politik dinasti dalam negara yang menganut sistem demokrasi khususnya Indonesia. selanjutnya penulis memaparkan perkembangan politik dinasti dari masa peralihan rezim Orde Baru ke masa Reformasi.

Bab IV merupakan bab inti dari tulisan ini. Dalam bab ini penulis akan berbicara tentang perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia di tengah ancaman praktik politik dinasti di bawah judul **“Fenomena Politik Dinasti Sebagai Tantangan Bagi Sistem Demokrasi di Indonesia”** pada akhir bab ini penulis akan memberikan solusi untuk meminimalisir praktik politik dinasti dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Bab V merupakan bab akhir. Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan umum dari tulisan ini.